

# PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA LOKASI DAMPAK SEMBURAN LUMPUR LAPINDO KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO

**Yuanita Berlin, Irwan Noor, Siswidiyanto**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang  
E-mail: yuanitaberlin371@yahoo.com

**Abstract:** *Implementation of Infrastructure Development on Lapindo Mudflow Location in Porong Sidoarjo.* Development can also be referred to as a multi-dimensional process involving a wide range of existing resources in an effort to improve the quality of life of the community, which is carried out continuously based on capabilities in accordance with the existing science and technology and attention to the problems that already exist. In this study discusses an implementation of infrastructure development in the Porong subdistrict of Sidoarjo district affected Lapindo mudflow. Numerous attempts have been made by the government to improve and rebuild the infrastructure to meet the needs of the victims of the Lapindo mudflow. Sidoarjo regent goal is concerned with the safety and convenience of the public, and therefore the government continues to make development and strive to meet the demands of society, so that people do not feel neglected by the government. And this study used qualitative research where research using interviews and conducting research directly to the study site. With the development is expected the government will continue to pay attention to the state of society.

**Keywords:** *implementation development, development infrastructure, lapindo mudflow*

**Abstrak:** **Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pada Lokasi Akibat Semburan Lumpur Lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.** Pembangunan juga dapat disebut sebagai proses multi dimensi yang melibatkan berbagai macam sumber daya yang ada dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada serta teknologi dan memperhatikan masalah yang sudah ada. Dalam penelitian ini membahas tentang sebuah pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo yang terkena dampak semburan Lumpur Lapindo. Berbagai usaha sudah dilakukan pemerintah dalam memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat korban dari semburan lumpur lapindo. Tujuan bupati kabupaten Sidoarjo yaitu mementingkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, maka dari itu pemerintah terus menerus melakukan pembangunan dan berusaha untuk memenuhi permintaan dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa diabaikan oleh pemerintah. Dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dimana penelitiannya menggunakan metode wawancara dan melaksanakan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan pemerintah akan terus memperhatikan keadaan masyarakat.

**Kata kunci:** pelaksanaan, pembangunan, infrastruktur, lumpur lapindo

---

## Pendahuluan

Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara terus menerus dan melibatkan semua sumber daya yang telah ada untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk menjalankan terlaksananya sebuah konsep dengan menggunakan kemampuan dan teknologi yang ada tentu melihat adanya masalah yang dihadapi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dalam kehidupan masyarakat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan elemen-elemen yang ada didalam masyarakat pada sebuah kehidupan negara dan

bermasyarakat. Salah satu cara Pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yaitu melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik disamping meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Dalam proses pembangunan sarana infrastruktur yang berperan penting yaitu dalam mendukung aktivitas ekonomi adalah dalam aspek budaya, sosial dan kesatuan persatuan bangsa karena hal ini sebagai modal dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan komunikasi antar kelompok

masyarakat dan dapat meningkatkan hubungan antarwilayah, hal ini termasuk menjadi masukan penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, pemerintah telah berupaya baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka kebijakan regulasi maupun kerangka kebijakan investasi melalui rehabilitasi kapasitas layanan infrastruktur yang rusak dan meningkatkan kapasitas layanan melalui pembangunan baru. Dengan adanya dua kerangka kebijakan tersebut diharapkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur dapat meningkat terutama untuk menekan tingkat kecelakaan dibidang transportasi, mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak sebagai akibat dari banjir, longsor, gempa, luapan lumpur. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Porong memang dari awal sudah mengalami hambatan besar, salah satu masalah yang ada saat itu adalah pembebasan lahan yang akan digunakan untuk relokasi pembangunan. Jika pembebasan lahan tersebut selesai dilakukan, maka pembangunan relokasi infrastruktur jalan tol Porong ini bisa dilakukan. Sekarang ini, yang dilakukan oleh tim pelaksanaan pembangunan ialah membangun jalan arteri yang berada di sebelah kiri dan kanan lokasi relokasi pembangunan jalan tol Porong. Ada beberapa kendala yang dihadapi terkait pembebasan lahan itu yaitu masih belum adanya kesepakatan harga dengan pemilik lahan. Selain itu, lahan yang akan dibebaskan tersebut merupakan tanah khas desa.

Dalam pembebasannya tim harus mencari tanah pengganti dengan ukuran sama di desa yang sama agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Kendala itulah, yang hingga saat ini masih belum ditemukan cara penyelesaiannya. Selain itu, masalah lain yang dihadapi seperti tanah yang akan dibebaskan tersebut merupakan tanah warisan. Pihak Ahli warisnya harus berdiskusi untuk menentukan pembagian warisan setelah lahan tersebut dibebaskan. Oleh sebab itu, tim pelaksanaan pembangunan meminta kepada warga masyarakat yang tanahnya belum dibebaskan agar memberikan kemudahan kepada tim. Karena bagaimanapun juga, pembangunan relokasi infrastruktur jalan tol Porong ini untuk kepentingan bersama dan juga perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

Akan tetapi masih banyak sorotan dari masyarakat masih banyak sekali jalan-jalan yang masih dalam keadaan rusak dan berlubang belum mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintahan pusat. Kerusakan jalan terjadi di

beberapa kecamatan terutama pada jalan-jalan antar desa yang dimana jalan tersebut merupakan akses perjalanan masyarakat setempat dalam melakukan berbagai kegiatan. Hal ini perlu ditangani secara cepat dan mendapatkan perhatian juga dari pemerintahan, karena selama ini dianggap pemerintah hanya memfokuskan perbaikan jalan yang berada pada pusat Kabupaten/Kota saja.

Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan tentu mempertimbangkan akuntabilitas kinerjanya. Sehingga bila pembangunan infrastruktur jalan di suatu daerah belum sesuai dengan harapan masyarakat maka bisa dilakukan komunikasi dua arah. Semoga dengan adanya komunikasi yang baik pemerintah dengan masyarakat, tidak terjadi lagi penanaman pohon di jalan rusak dan muncul umpatan-umpatan yang tidak perlu. Sidoarjo berusaha melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan yang akuntabel.

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tapi juga di wilayah pedesaan. Melalui proyek, sektor infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kondisi ini akan memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga bisa dibeli oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang penghasilannya masih rendah. Jadi, perputaran barang, jasa, manusia, uang dan informasi ikut menentukan pergerakan harga di pasar-pasar, dengan kata lain, bahwa infrastruktur jalan menetralkan harga-harga barang dan jasa antar daerah.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Administrasi Publik**

Siagian (2005:2), administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Soewarno Handyaningrat (1985:2) dalam bukunya, memberikan definisi: “Administrasi sebagai kegiatan daripada kelompok-kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama”. Administrasi dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu:

a. Administrasi dalam arti sempit diartikan terbatas sebagai kegiatan tata usaha yang berkenaan dengan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi.

- b. Administrasi dalam arti luas berhubungan dengan kegiatan kerjasama dan upaya (organisasi dan manajemen) yang bersifat sistematis, rasional, dan manusiawi yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.

Dari pengertian diatas maka administrasi dapat dipahami sebagai kegiatan tata usaha atau merupakan proses pelaksanaan keputusan dan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih orang untuk mencapai tujuan bersama.

## 2. Pembangunan

Pembangunan menurut Sondang P. Siagian (2007, hal.4) yaitu merupakan suatu usaha atau usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, atau pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofadidjaja (2002, hal.10) berpendapat bahwa pembangunan yaitu suatu upaya suatu masyarakat/bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai pandangan masyarakat/bangsa itu.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berarti upaya yang dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi peranannya secara wajar yakni sebagai subyek dan obyek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras dan dinamis, sedangkan ke dalam mampu menciptakan keseimbangan (Suryono, 2004, h.37).

Konsep pertumbuhan adalah suatu konsep yang memandang pembangunan dari sudut ekonomi, suatu negara dikatakan telah membangun apabila dalam negara tersebut telah terjadi kenaikan pendapatan perkapita penduduk. Konsep ini dipelopori oleh Rostow yang terkenal dengan teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Rostow menyatakan ada lima tahapan pertumbuhan penduduk dimulai dari "tahap masyarakat tradisional, tahap tradisional, tahap tinggal landas, tahap pemantaban, dan tahap konsumsi masa tinggi" (Suryono, 2004, h.26).

Konsep rekonstruksi adalah konsep untuk menggambarkan upaya suatu bangsa untuk memulihkan kondisi ekonomi negaranya yang rusak akibat adanya krisis dan peperangan. Konsep ini sangat terkenal pada masa pasca perang dunia II, dimana banyak negara-negara di Eropa yang rusak berat karena peperangan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh presiden Amerika Serikat yang terkenal dengan

*Marshal Plann* yang disebut juga dengan teori *autharki* (Suryono, 2004, h.28).

Konsep modernisasi adalah istilah yang sangat terkenal dalam konsep pembangunan. Modernisasi merupakan upaya merubah cara-cara produksi tradisional kearah penggunaan teknologi canggih. Modernisasi adalah penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aktivitas, semua bidang kehidupan atau semua aspek-aspek ke dalam masyarakat (Suryono, 2004, h.29).

Konsep pembebasan adalah suatu konsep pembangunan tentang bagaimana membebaskan manusia dari belenggu ketidakberdayaan akibat kemiskinan dan ketidakadilan. Jika manusia sudah terlepas dari belenggu ketidakberdayaan maka manusia dapat menciptakan keselarasan dan keserasian keluar, sedangkan ke dalam mereka mampu mewujudkan keseimbangan.

## 3. Pengertian Infrastruktur

Kata infrastruktur yang termuat dalam Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia diartikan sebagai "sarana" (1993, h.79). Sedangkan menurut Fajar Suryanto (2009), infrastruktur ialah suatu rangkaian yang terdiri atas adanya berbagai bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan, dimana jalan merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti: Pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan Infrastruktur memang diperlukan secara mendalam dan aktif antar institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur tentu berdasarkan atas sebuah gagasan, yang dimana memiliki maksud dan tujuan yang harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Keberhasilan sebuah pembangunan infrastruktur yaitu dapat diukur dari sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat meningkat. Hubungan fungsi antara infrastruktur yang ada sangat menentukan tingkat kemanfaatannya. Menurut Fadjar Suryanto (2009), infrastruktur dapat digolongkan kedalam beberapa kategori antara lain :

- a) Obyek Rahasia: gedung pusat pemerintahan, pusat penelitian, instansi militer, instansi polisi, BIN.
- b) Obyek vital: pusat & jaringan listrik, pusat & jaringan komunikasi, pusat

perdagangan, pusat eksplorasi, pusat konsentrasi masyarakat, bendungan, sarana & prasarana transportasi, sentra sembilan bahan pokok, kawasan industri.

- c) Obyek strategis: pabrik alat tempur militer, pabrik obat-obatan, radar pengamat, garis perbatasan.
- d) Obyek umum: bangunan fasos & fasum (pendidikan, peribadatan, tempat hiburan, taman, jalur hijau dll).

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitiannya adalah di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Data primer diperoleh dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan mencari dokumen-dokumen yang sesuai tema penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah Upaya BPLS dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur (a) Sasaran pembangunan, mencakup: 1) Tersedianya infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 2) Meningkatkan kualitas kemampuan masyarakat 3) Terlaksananya pembangunan infrastruktur yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan. (b) Sumber dana yang didapatkan untuk melaksanakan pembangunan (c) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh BPLS (d) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Analisis data menggunakan metode analisis model interaktif yang menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008, h.91-99) ada tahapan yang harus dilalui yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

### Pembahasan

#### 1. Upaya Pembangunan Infrastruktur

##### a. Sasaran Pembangunan

###### 1.) Kegiatan Penanganan Luapan

Pembangunan Tanggul untuk Penahan Luapan Lumpur, kegiatan penanganan luapan lumpur terutama berupa pekerjaan pembuatan tanggul, yang meliputi pengadaan material, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan material timbunan yang dilaksanakan di atas permukaan yang telah disiapkan. Material dari *borrow area* yang sesuai untuk bahan timbunan dapat langsung diangkut ke lokasi timbunan atau ditempatkan di *stock pile*.

#### 2.) Kegiatan Penanganan Infrastruktur Sekitar Semburan

##### a.) Penanganan Drainasi

Pekerjaan fisik drainasi dimulai pada awal bulan Nopember 2007 dengan prioritas penanganan drainasi untuk mengurangi tergenangnya jalan arteri Porong dan permukiman di sekitarnya. Penanganan pada tahun 2008 dan selanjutnya, dilaksanakan berdasarkan prioritas sesuai dengan rencana dan kondisi lapangan.

##### b. Sumber Pendanaan Program Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

Secara umum PAGU DIPA BPLS pada tahun 2011 mendapat alokasi sebesar RP. 1,286 trln dengan pembagian 2 program utama yaitu Program Dukungan Manajemen dengan alokasi sebesar Rp 22,7 miliar dan Program Teknis dengan alokasi sebesar Rp. 1,263 triliun. Program teknis sendiri dapat dibagi menjadi 3bidang penanganan, yakni bidang operasi, bidang sosial, dan bidang infrastruktur. Total dari penyerapan BPLS adalah sebesar Rp. 572,17 miliar atau sebesar 44,49 % terhadap PAGU BPLS.

##### Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Terkait Dengan Semburan Lumpur

Pelaksanaan penanganan terkait dampak semburan lumpur sudah dilakukan di beberapa titik semburan yang terdapat di beberapa desa yaitu di Desa Mindi yaitu penutupan sumur di Desa Mindi, kegiatan ini dilakukan untuk menahan semburan pada saat aktivitas tinggi dan sekaligus sebagai antisipasi jika semburan aktif kembali. Selain itu terdapat juga luapan air dan pasir di belakan Polsek Porong, penangan yang dilakukan yaitu pemasangan pipa air yang dialirkan ke sungai dengan maksud agar air yang meluap tidak menyebar ketempat lain. Laporan selanjutnya menunjukkan bahwa adanya semburan di rumah warga di desa Pamotan yang dimana mengalami keretakan, penanganan yang sudah dilakukan yaitu dengan menambal keretakan tersebut untuk mencegah keretakan yang semakin parah. Menindak lanjuti adanya kebocoran yang menyebabkan separator bubble di pabrik es bagian belakang tidak sempurna, maka dilakukan perbaikan separator.

Dalam Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (APKASI) berupaya ikut andil dalam menghijaukan kawasan bencana Luapan Lumpur Sidoarjo di Porong Sidoarjo. Asosiasi beranggotakan bupati se-Indonesia ini mengadakan aksi tanam pohon di daerah bekas pasar Porong Lama. Lahan seluas satu hektar ini dinamakan Taman APKASI, sejumlah bupati dan perwakilan Pemkab anggota APKASI menanam masing-masing pohon di areal taman itu.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat

### a. Faktor Pendukung

Dalam mensukseskan pembangunan setiap lembaga sosial dan sektor kehidupan ekonomi harus diperhatikan infrastrukturnya. Berdasarkan karakteristik infrastruktur itu sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai pendukung pembangunan infrastruktur itu sendiri, yaitu sistem sosial, sistem ekonomi, infrastruktur, dan keadaan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa secara ideal lingkungan alam merumakan pendukung dari sistem infrastruktur, dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur. Sistem sosial sebagai obyek dan sasaran yang didukung oleh sistem ekonomi.

### b. Faktor Penghambat

Dalam penanggulangan lumpur ada beberapa kendala yang menjadi penghambat misal merelokasi tempat-tempat yang terdampak semburan lumpur dan pembebasan tanah. Selain itu aksi demonstrasi warga yang sering kali dilakukan oleh korban lumpur lapindo yang menuntut atas hak-haknya yang belum dipenuhi oleh pemerintah. Warga menunggu keputusan dengan harapan sangat optimis bahwa korban lumpur dapat diselesaikan dengan menggunakan dana APBN, tentunya persepsi yang optimis tersebut harus terus diwaspadai, bila keputusan yang dihasilkan tidak memenuhi keinginan warga.

### Kesimpulan

Upaya Pembangunan Infrastruktur jalan dan Jembatan bagi daerah korban semburan Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan tujuan Bupati demi keamanan dan kenyamanan masyarakat secara sempit maupun secara luas, maka pemerintah kabupaten Sidoarjo mengadakan pemabngunan infrastruktur jalan dan jembatan terkait dengan adanya bencana

semburan lumpur lapindo di kecamatan Porong, maka pemerintah kabupaten Sidoarjo tidak tinggal diam dalam melakukan pembangunan.

Dalam penanggulangan lumpur ada beberapa kendala yang menjadi penghambat misal merelokasi tempat-tempat yang terdampak semburan lumpur dan pembebasan tanah. Selain itu aksi demonstrasi warga yang sering kali dilakukan oleh korban lumpur lapindo yang menuntut atas hak-haknya yang belum dipenuhi oleh pemerintah. Warga menunggu keputusan dengan harapan sangat optimis bahwa korban lumpur dapat diselesaikan dengan menggunakan dana APBN, tentunya persepsi yang optimis tersebut harus terus diwaspadai, bila keputusan yang dihasilkan tidak memenuhi keinginan warga

### Saran

1. Meskipun pembangunan infrastruktur sudah dilakukan dan relokasi infrastruktur sudah berjalan sampai saat ini, namun pemerintah harus tetap menyelesaikan tanggungan dengan masyarakat yang sampai saat ini haknya belum dipenuhi. Karena hal tersebut juga akan menjadi salah satu penghambat jalannya pembangunan.
2. Rencana pembangunan RTH yang dilakukan pemerintah saat ini memang sebagian sudah terealisasi, namun pemerintah juga harus memperhatikan kesuburan tanah dan tanaman yang sudah ditanam. Menurut sepengetahuan setelah diadakannya penelitian masih tampak taman yang sudah ada masih belum terlihat sehat dan masih terlihat gersang. Maka pemerintah, khususnya bagi dinas pertamanan harus lebih memberikan perhatian khusus jika memang untuk kedepannya lahan yang tersisa di Kecamatan Porong akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau.

---

### Daftar Pustaka

- Miles, B.B. dan A.M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy S. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sjafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Padang: Baduose Media
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. *Dasar-Dasar Imlu Administrasi Publik*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2007. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: UM Press
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tjokroamidjodo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Toko Gunung Agung